

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Airlangga University Press, 2025.
- Fakultas Hukum UM Bengkulu, *Pedoman Penulisan Skripsi*. 2025.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Heru Winarko, *Awas Narkoba Masuk Desa*, Direktorat Advokasi, 2018.
- Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, 2020.
- Mustakim Laa Dee, *hukum pembuktian dalam perkara pidana*, PT Media Penerbit Indonesia, Cetakan Pertama Juli 2024.
- S. Tanussubroto, *dasar-dasar hukum accra pidana*, Bandoeng, Penerbit Armico, 1984.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Viva Justicia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Genesis Learning, 2016.

B. JURNAL

- Dimas Indianto Wahyudi, dkk., “Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)”, Jurnal: Diponegoro Law Journal, 10.1 (2021): hal 98.
- Dimas Indianto Wahyudi, dkk., “Implementasi Dasar Pertimbangan Jaksa Penuntut Umum Dalam Menentukan Berat Ringannya Tuntutan Pidana Terhadap Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi di

Kejaksaan Negeri Semarang”, Jurnal: Diponegoro Law Journal, 10.1 (2021):, hal 99

Immanuel Simanjuntak, Kedudukan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Jenis Shabu-Shabu. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Butir 5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 114 ayat (1)

Pasal 112 ayat (1)

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 132

D. WEBSITE

<https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>, diakses, pada 03 Maret 2026.

E. SUREL DAN LAINNYA

Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI

Putusan Nomor 28 Pid.Sus/2025/PN.Agm

Hasil wawancara dengan Bapak Edo Putra Utama, selaku Kasubsi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi di Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, Pukul 09.00 WIB

LAMPIRAN





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
KEJAKSAAN NEGERI BENGKULU UTARA

Jl. Jenderal Sudirman No. 236 Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara 38611
www.kejaksaan.bengkuluutara.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 1480 /L.7.12/Cp.1/05/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIZA OKTARI, S.H.**
Nip : 19851003 200812 2 003
Pangkat : Madya Wira
Jabatan : Kasubag Pembinaan Pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara

Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **Carles Wirayuda**
NPM : 2274201100
Jurusan : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu
Alamat : Aturan Mumpo Kecamatan Pematang Tiga Bengkulu Tengah

Telah selesai mengadakan Riset/Penelitian dalam mengumpulkan data guna menyelesaikan Program Studi Sarjana Hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu di Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, **dengan judul :**

" Analisis Penanganan Perkara Pembuktian Kasus Tindak Pidana Narkotika Dalam Pembelian dan Penjualan Narkotika Golongan 1 (satu)"

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Arga Makmur, 11 Mei 2026
Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara
Kepala Sub Bagian Pembinaan



RIZA OKTARI, S.H.
Madya Wira NIP. 19851003 200812 2 003

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara;
(sebagai Laporan)
2. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara;
3. Arsip.



Surat ini telah diundangkan secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan
oleh Badan Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSI).
Bastion Siber dan Sandi Negara

